

**PLURALISME PEWARISAN MASYARAKAT ISLAM  
MENUJU UNIFIKASI HUKUM KEWARISAN  
DI INDONESIA**

**DISERTASI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum**

**Universitas Andalas**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ISHAQ  
1830112012**

**Promotor :**

- 1. Prof.Dr. Yaswirman,SH.,MA**
- 2. Dr. Mardenis, SH.,M.Si**
- 3. Dr. Wetria Fauzi, SH.,MH**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## PLURALISME PEWARISAN MASYARAKAT ISLAM MENUJU UNIFIKASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

(Tim Promotor : Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.H., Dr. Mardenis, S.H., M.H.,  
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.)

### ABSTRAK

Pluralisme hukum waris bagi masyarakat Islam di Indonesia, dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat dan hukum waris KUHperdata yang masing-masing sistem hukum tersebut, mempunyai kebutuhan hukum waris yang berbeda pula dan belum ada pengaturannya yang di unifikasi. Untuk mewujudkan unifikasi hukum waris Islam di Indonesia dibutuhkan upaya-upaya yang maksimal, yang memerlukan waktu dalam penyusunannya secara nasional, serta kehati-hatian, karena kewarisan erat hubungannya dengan faktor agama, kepercayaan, dan kebudayaan masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan masalah digunakan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), didapatkan hasil bahwa dengan adanya perbedaan budaya, sistem kekerabatan pendapat-pendapat ulama Islam yang menimbulkan Pluralisme Hukum Waris. Untuk mengantisipasi sengketa maupun perselisihan tersebut, maka perlu diwujudkan langkah-langkah Unifikasi hukum waris Islam yang beragam agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya yang didasarkan pada: *Pertama*, pengaturan sistem Kewarisan Masyarakat Islam di Indonesia harus didasarkan ayat suci Al-Qur'an sebagai sendi utama pengaturan warisan dalam Islam di Indonesia; *Kedua*, dan salah satu upaya untuk unifikasi dalam waris itu pembagian harta waris dilakukan dengan prinsip keadilan bagi para ahli waris dan prinsip kesepakatan damai atau perdamaian diantara para ahli waris yang diilhami oleh hukum Islam. *Ketiga*, untuk mewujudkan Unifikasi Hukum Waris Indonesia, dapat dilakukan dengan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legalsistem*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legalstructure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian untuk melakukan unifikasi sistem hukum nasional khususnya hukum waris Islam bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam melibatkan matarantai hubungan ketiga komponen istem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional. Sehingga dimasa depan hukum waris yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan visi masa depan dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia (mazhab Indonesia) atas dasar prinsip *maslahah*.

**KataKunci** : Pluralisme, Hukum Waris, Unifikasi

**THE PLURALISM OF ISLAMIC COMMUNITY INSTRUCTIONS  
TOWARDS UNIFICATION OF INSTRUCTION LAW IN INDONESIA**

(Promoter Team: Prof. Dr. Yaswirman, S.H., M.H., Dr. Mardenis, S.H., M.H.,  
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H.)

**ABSTRACT**

Pluralism of inheritance law for Muslim communities in Indonesia is influenced by the inheritance system that applies in Indonesia, namely customary inheritance law and the Civil Code of inheritance, each of which has different legal requirements for inheritance and there is no unified regulation yet. In order to realize the unification of Islamic inheritance law in Indonesia, maximum efforts are required, which require time to be drafted nationally, as well as caution, because inheritance is closely related to factors of religion, belief, and community culture. By using normative research methods with a problem approach using statutory approach and a conceptual approach as well as a case approach, the result is that with cultural differences, the kinship system of Islamic scholars' opinions gives rise to pluralism. Inheritance law of Islamic inheritance law so that there are no overlaps in its application which are based on: realize unification major inheritance arrangements in Islam in Indonesia; Second, and one of the efforts for unification in inheritance is the distribution of inheritance is carried out with the principle of justice for the heirs and the principle of a peace agreement or peace between the heirs which is inspired by Islamic law. Third, to realize the Unification of Indonesian Inheritance Law, this can be done by adjusting the elements of the applicable legal order within the framework of the national legal system (legal system) which includes components of legal substance (legal substance), components of the legal structure and its institutions (legal structure) and components legal culture. Thus to unify the national legal system, especially Islamic inheritance law for Indonesians who are Muslim involves a chain of relations between the three components of the legal system within the framework of the national legal system. So that in the future the inheritance law contained in the Compilation of Islamic Law is a vision for the future in an effort to make Islamic law a positive law for Muslims in Indonesia (Indonesian mazhab) on the basis of the maslahah.

**Keywords** : Pluralism, Inheritance Law, Unification